**BAB I PENDAHULUAN**

# Latar Belakang Masalah Penelitian

Britania Raya adalah negara kesatuan dengan monarki konstitusional (kerajaan, ratu atau kaisar) dan sistem parlementer.Pusat pemerintahan berada di ibu kota, London. Inggris memiliki 4 negara berdaulat, yang masing-masing merdeka. Negara-negara tersebut adalah: Inggris (England), Wales, Skotlandia, Irlandia Utara. Ibukota Inggris Raya terletak di London, Inggris. Meski berada di bawah naungan Inggris, keempat negara ini tetap mengelola pemerintahan dan otonominya sendiri. Oleh karena itu, dari perspektif pemilihan parlemen, kebijakan nasional sangat berbeda karena memiliki budaya sendiri. Kerajaan Inggris mungkin disebut "Britania Raya" dalam bahasa Inggris, bukan negara, tetapi nama sebidang tanah. Tanah di atas terdiri dari 3 negara: Inggris memiliki wilayah terbesar di Inggris (57%), diikuti oleh Skotlandia (34%), dan kemudian Wales (9%).

Masyarakat Inggris terbagi menjadi dua kategori, yaitu konservatif dan progresif.Kedua prinsip ini bersifat ideologis dalam politik dan ilmu sosial. Keduanya menjelaskan sikap individu/kelompok terhadap kemajuan sosial. "Konservatif" menggambarkan seseorang yang konservatif tentang perubahan dan melibatkan tetap sama, sedangkan "kemajuan" berarti seseorang yang mendukung atau mempromosikan perubahan dan kemajuan baru dalam berbagai cara. Perbedaan utama antara konservatif dan progresif adalah bahwa konservatif memegang sikap konservatif dan karena itu tidak mendukung perubahan politik dan sosial, sedangkan progresif lebih memilih perubahan dan inovasi politik dan sosial. (GAYO, 2013)

Seperti yang dilansir oleh banyaknya media serta jurnal maupun artikel baik cetak maupun elektronik bahwa terdengar isu terkait Brexit (Britain exit) yakni Britania Raya mengadakan referendrum untuk keluar dari Integrasi Uni Eropa. Pada akhirnya Masyarakat Britania Raya harus terpecah belah menjadi dua golongan yang professional Uni Eropa dan kotra Uni Eropa. dimana golongan yang kontra terhadap Uni eropa merasa bahwa Inggris perlu

menghentikan kerjasamanya di bidang politik, ekonomi, impor-ekspor, serta "free development individuals Europe" dengan Uni Eropa, Karena hal tersebut dikatakan merugikan masyrakarat Britania Raya.(News, 2016) Dalam partai politik yang ada di Britania Raya golongan kontra terhadap Uni eropa ini didominasi oleh Partai Konservatif, yang tokoh pentingnya yaitu Boris Johnson, Theresa may, dan David Cameroon.(Cnn Indonesia, 2016) Beliau semua adalah salah satu politikus Internasional yang sangat berpengaruh terhadap kampanye mendukung Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa. Sedangkan di golongan expert Uni Eropa yaitu dari Partai Buruh, saingan besar dari partai Konservatif. tokoh politkus nya yaitu Jeremy Corbyn. (Cnn Indonesia, 2016)

Britain Exit (Brexit) merupakan kejadian serta isu-isu yang sangat bersejarah panjang bagi masyarakat Britania Raya yang menginginkan negaranya untuk meninggalkan Uni Eropa, yang pelaksanaanya dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Britania Raya, David Cameron (Iyengar, 2016) Keinginan ini didasari oleh asumsi sebagian kelompok masyarakat Britania Raya yang merasa bahwa Uni Eropa telah melanggar kedaulatan Britania Raya dalam berbagai aspek yang semakin hari semakin mengontrol dan juga intervensi terhadap kehidupan sehari-hari Britania Raya. Karena Britania Raya merasa terbebani oleh regulasi Uni Eropa yang dinilai telah membuat peraturan dan banyak membatasi bisnis di Britania Raya serta prinsip yang di implementasikan oleh Uni Eropa mengenai "Free Development of Individuals" telah membawa banyak imigran kedalam Britania Raya sehingga, memicu serta memunculkan berbagai permasalahan seperti persaingan tenaga kerja serta menghilangkan kesempatan masyarakat Britania Raya untuk dapat berkerja di negaranya sendiri, sosial budaya dan juga gangguan keamanan yang disebabkan meningkatnya jumlah imigran yang ada di Britania Raya.(Puspita Sari, 2016) Britania Raya telah menilai bahwasanya Uni Eropa sudah sangat mengintervensi dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Britania Raya. Dengan adanya kebijakan Brexit ini, diharapkan Britania Raya bisa berdiri sendiri menjadi negara bebas dan tidak terikat oleh organisasi internasional manapun. (Horan, 2016)

Hal tersrbut, merupakah suatu Gerakan yang sangat berkembang dengan pesat bagi masyarakat Britania Raya yang menginginkan negaranya untuk keluar

dari keanggotaan Uni Eropa melalui kebijakan referendum pada tahun 2016. (CNN Indonesia, 2016) Submission ini bukan yang pertama kalinya dilaksanakan oleh Inggris. Sebelumnya, Britania Raya pernah melaksanakan submission juga pada tahun 1975 yaitu *Choice* keanggotaan Komunitas Eropa Britania Raya.(CNN Indonesia, 2016)

dengan dengan keputusan suara sebesar 67% yang menginginkan keras agar Britania Raya tetap tergabung dalam integrasi Uni Eropa pada saat itu, karena masih banyak kepentingan inggris yang sangat di butuhkan di Uni eropa dari segmen politik maupun Ekonomi. (Lestari, 2017) setelah 2 tahun, pada saat itu Britania Raya masih tergabung dengan keanggotaan Uni Eropa, pada akhirnya menimbulkan keraguan Kembali terhadap Uni Eropa permaslahan Eurozone, terlalu birokratis, imigran dan masih banyak lagi. pada saat itu munculah Sentimen-sentimen kritik terhadap Uni Eropa dan *against* terhadap Uni eropa masih ada di Britania Raya sehingga hal tersebut membentuknya opini publik yang mendorong pemerintah untuk melaksanakan kembali kebijakan choice yang dinamakan Britain Exit (Brexit) tersebut. (Iyengar, 2016)

Britain Exit (Brexit) bukanlah sebuah permasalahan atau isu-isu yang baru muncul secara alami. Tetapi, terdapat faktor – faktor yang menyebabkan munculnya isu serta fenomena tersebut. Bisa karena faktor keraguan, kesengsaraan, ataupun kerugian. Berkaitan dengan pendapat konstruktivisme yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia internasional bukanlah sesuatu yang diberikan, ada konstruksi sosial dalam bentuk inetraksi antara suatu aktor dengan aktor lainya yang saling mempengaruhi. Sehingga pengaruh tersebut semakin menyebar luas hingga ke seluruh masyarakat. (Suryono, 2015) Interaksi tersebut telah dipengaruhi oleh ide-ide yang berkebalikan dari ide awal yang diimplementasikan, karena konstruktivisme lebih mendahulukan aspek dan paham ideasional/identitas dari pada paham material dalam kasus Britain Exit ini, peneliti telah menemukan sebuah paham bahkan sudah menjadi sebuah gerakan yang dinamakan Euroscepticism.

Euroscepticism merupakan sebuah ideologi yang berprinsip pada bentuk penentangan serta kritik kepada Uni Eropa. Karena, merasa banyak dirugikan jiga tergabung didalamnya. Euroscepticism memiliki premise masa yang tersebar

di setiap negara-negara anggota. Kelompok ini hadir di wilayah Uni Eropa pada tahun 1990-a yang sebelumnya di Inggris dikenal dengan sebutan against maketeers yang merupakan orang-orang yang tidak sepakat dengan keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada tahun 1960-an. Dengan demikian lahirnya kelompok tersebut memberikan tekanan pada kestabilan organisasi Uni Eropa. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika kelompok Eursoceptic yang ada di negara-negara anggota Uni Eropa dengan mudah mempengaruhiEursoceptic yang ada di negara-negara anggota Uni Eropa dengan mudah mempengaruhi pemikiran masyarakat dan badan pemerintahan untuk melepaskan keanggotaan negaranya dari Uni Eropa. (Hansen, 2008)

Menurut Taggart dan Szczerbiak, Euroscepticism memilik 2 ciri khas nya yaitu delicate Euroscepticism dan hard Euroscepticism. Yang pertama, delicate Euroscepticism yang berarti meilhat kebijakan serta proyek yang diajukan oleh Uni eropa tidak selaras dengan kepentingal nasionalis negara anggota khususnya Britania Raya. Yang kedua, yaitu Hard Euroscepticism yang menilai bahwa integrasi Uni eropa sangat tidak menguntungkan bagi negara anggota Eropa. Dapat diindentifikasikan dari ciri-ciri yang sudah di paparkan bahwa kelompok euorscepticism ini sangat menentang Uni Eropa dan akan berusaha lebih keras dengan segala technique untuk tersingkir dari Uni eropa. (Taggart & Szczerbiak, 2002)

Pada 23 Juni 2016, Britania Raya melakukan choice pemungutan suara Brexit yang bertujuan memberikan kesemepatan terhadap masyarakat Britania Raya untuk memutuskan apakah harus keluar dari Uni Eropa atau Tetap tergabung dalam Integrasi Uni Eropa. (Huffingtonpost.com, 2016) Hal ini kemudian memicu masyarakat Britania Raya membentuk 2 golongan atau blok yaitu Vote Remain dan Vote Leave. Masyarakat yang tergabung dalam blok Vote Remain ini adalah masyarakat yang menolak Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa yang didominasi oleh Partai Buruh di Britania Raya. Masyarakat yang mendukung Vote Remain tersebut menginginkan Britania Raya untuk tetap berada di Uni Eropa karena masyarakat Britania merasa mendapatkan lebih banyak manfaat dalam tergabungnya dengan Uni Eropa. Salah manfaatnya yaitu lebih mudah melakukan perdagangan dan mempermudah mencari lapak

pekerjaan. Karena, migrasi dari satu negara ke negara lain lebih mudah tanpa adanya visa karena, Britania Raya masih terikat dengan Integrasi Uni Eropa. Sedangkan kubu oposisi yaitu Vote Leave mendukung keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa. Hal ini dikarenakan bagi kubu Vote Leave, Uni Eropa hanya membuat Britania Raya penuh dengan masyarakat imigran sehingga para pekerja lokal serta masyarakat nearby yang belum mendapatkan lapak perkejaan di Britania Raya harus bersaing dalam tenaga kerja dengan warga Eropa lainnya sehingga tidak jarang masyarakat Britania Raya pada akhirnya kehilangan peluang untuk dapat bekerja di wilayahnya sendiri. Dan partai yang mendominasinya yakni partai Konservatif. Selain itu, kubu Vote Leave merasa terbebani dengan anggaran wajib keanggotaan Uni Eropa yang mana Britania Raya telah berkontribusi sekitar £13 billion atau setara dengan $19 billion *for every years*. Anggaran yang begitu besar membuat kubu VoteLeave berpendapat bahwa akan lebih baik apabila jumlah ostensible uang tersebut digunakan untuk keperluan Britania Raya sendiri karena masih banyak yang dibutuhkan oleh negara Britania Raya terhadap masyarakatnya. (Puspita Sari, 2016)

Selain itu, menurut David Cameron, Britania Raya akan dianggap aman apabila bersama 27 anggota negara lainnya dibandingkan berdiri sendiri, karena menurutnya akan lebih sulit untuk mencapai suatu keinginan yang diningkan oleh inggris. Apabila meninggalkan Uni Eropa maka Britania Raya akan dihadapkan banyak masalah selain perekonomian yaitu masalah security, Gross domestic product (GDP) menurun, bahkan akan menimbulkan salah satu dari negara kesatuan Britania Raya yang memutskan untuk menarik diri dari negara kesatuan tersebut. Bahkan organisasi internasional seperti IMF mengatakan bahwa apabila Britania Raya memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, maka konsekuensinya adalah negosiasi dengan Uni Eropa akan memberikan dampak yang signifikan seperti penanaman modular dan menimbulkan gejolak di pasar moneter yang akan merusak perdagangan reciprocal dan transaksi keuangan dengan Uni Eropa serta membatasi kerjasama ekonomi dan manfaat integrasi dari hubungan kerjasama Uni Eropa dan Britania Raya itu sendiri. semua sangat berbeda dalam berbagai masalah yang terjadi. Oleh karena itu, seluruh kebijakan yang ditetapakan oleh Uni Eropa terkait perubahan aturan dan hukum internasional tidak dapat disamaratakan dengan aturan-aturan sebuah negara.

Salah satu permasalahan ekonomi yang saat itu dihadapi oleh masyrakat Britania Raya ketika tergabung dengan Integrasi Uni Eropa adalah Britania Raya mengalami defisit perdagangan (import/export imbalance) dari negara-negara yang tergabung dengan Uni Eropa, dengan jumlah rata-rata 30 juta pounds (poundstreling) per-hari. Karena, saham tiap hari nya akan mengalami peningkatan bahkan penurunan.(News, 2016) Sementara, kenyataan yang harus dihadapi pada saat itu oleh Inggris adalah mengalami surplus perdagangan (surplus shortage) dengan setiap negara didunia. Permasalahan selanjutnya adalah terkait Imigrasi, warga Inggris neighborhood (*Briton*) berspekulasi tinggi bahwasanya berlimpahnya masyarakat asing atau disebut imigran di negara mereka akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat nearby seperti pengangguran, upah yang rendah, negara menjadi sangat padat, Biaya hidup makin meningkat dengan banyak populasi di negara tersebut, menurunya sistem pendidikan, Kesehatan, serta kemacetan lalu lintas. Hal ini dikarenakan Uni Eropa telah memperbolehkan untuk imigran yang ingin melakukan aktifitas di bagian negara yang terintegrasi oleh Uni Eropa. Sebab dalam regulasi yang di sah-kan oleh Uni Eropa, seorang warga negara anggota Uni Eropa mempunyai hak untuk melakukan perjalanan wisata, dan bekerja di negara- negara Uni Eropa lainnya dengan visa yang sama. Tentu itu mempermudah bagi masyakrat imigran untuk mencapai pekerjaan mereka di negara lain .(Tempo, 2020)

Partai konservatif, disebut sebagai partai anti-eropa atau bisa dikatakan kelompok Eurosceptic. Kelompok Eurosceptic adalah sekumpulan orang-orang yang tidak suka dengan Uni Eropa. Pandangan Eurosceptic dapat dikatakan selalu bersebrangan dengan seluruh proyek Uni Eropa karena proyeksi serta kebijakan dari Uni Eropa itu sendiri merupakan hasil yang buruk jika diterapkan kepada negara-negara mereka. Dalam beberapa kepustakaan akademik Euroscepticism disebut sebagai radikalisme sayap kanan dan nasionalisme. Euroscepticism muncul karena adanya integrasi yang akan dibentuk pasca perang dunia ke dua. (Poláková, 2016)

Kelompok Eurosceptic tergolong dari partai politik sampai masyarakat dari negara-negara di Uni Eropa. Menurut kelompok tersebut, konsep yang

ditawarkan oleh Uni Eropa akan membawa hasil yang dapat mengintimidasi hak-hak kedaulatan negara anggota. Kelompok ini melakukan intervensi secara terbuka pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Kekhawatiran bagi Uni Eropa adalah ketika negara-negara anggota dengan mudah terpengaruh dengan pemikiran dari kelompok tersebut (Euroscepticism) kelompok penentang Uni Eropa. (Leonard & Torreblanca, 2014) Melihat fenomena yang terjadi di Inggris, kelompok-kelompok Eurosceptic dari partai politik dan perseorangan yang tersebar di negara-negara anggota Uni Eropa bereaksi untuk sangat mengeritik terhadap Integrasi Uni Eropa yang di padang merugikan negara- negara Eropa. Langkah kongkrit yang diambil oleh David Cameron untuk melaksanakan referendum di Inggris dengan berlandaskan permasalahan yang timbul dari Uni Eropa dan mengganggu hak-hak kedaulatan serta kestabilan Inggris, membuat kelompok-kelompok di negara anggota lainnya membuat ulasan terhadap negaranya. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Inggris kini menjadi sebuah permasalahan global bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Marine Le Pen dan Greets wilders merupakan aktor euro-skeptis negara Belanda dan prancis yang selalu melakukan kampanye menentang kebijakan-kebijakan dan proyek yang dicanangkan oleh Uni Eropa. Adapun dari partai sayap kanan seperti Public Fronts (NF) Prancis, Opportunity gathering of Australia(FPÖ), Gathering for Opportunity (PVV) Belanda, Northern Alliance (LN) Italia, Vlaams Belang (VB) Belgia, Elective for Germany (AfD) Jerman, Congress of the New Right (KNP) Polandia, dan Swedish leftists (SD) Swedia. (Hikmawan, 2017)

Kemudian, Ada beberapa hal yang berlatar belakang mengenai sikap Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa, seperti contohnya permasalahan politik domestik, ekonomi domestik, dan imigrasi.(Simonamoagar, George-cornel, 2015) Pertama, Pemerintah Britania Raya menganggap bahwasanya dengan bergabungnya Britania Raya dengan Organisasi Internasional Eropa (Uni Eropa) saat ini dapat merasa sangat dirugikan serta dapat terancam hak-hak kedaulatan serta nasionalisme English itu sendiri. (Reuters, 2021) Mereka yang skeptis dengan Uni Eropa menganggap Integrasi Uni Eropa tidak bertanggung jawab langsung kepada pemilih di Britania Raya. Padahal, di satu sisi Uni Eropa

memiliki otoritas terhadap negara-negara anggota yang di gengam-nya. (CNN, 2020)

Britania Raya harus menerima hal tersebut sebagi konsekuensinya dalam bergabung dengan keanggotaan Uni Eropa sat ini, Inggris telah ditekkan oleh Uni Eropa dengan aturan-aturan yang sama dengan negara-negara Eropa lainya. Sedangkan Britania Raya telah menelusuri lebih dalam serta memandang bahwa setiap negara Kawasan Eropa yang tergabung dalam keanggotan Uni Eropa mempunyai cara pandang yang berdeda-beda. (Lestari, 2017)

Pada awal tahun 2016 absolute anggota keseluruhan dari Integrasi Uni Eropa sebanyak 28 negara anggota termasuk Britania Raya. Sampai pada pertengahan tahun tepatnya pada tanggal 23 Juni 2016 melalui choice di Inggris menyatakan bahwa Inggris merupakan negara yang tidak lagi tergabung menjadi negara anggota European Association. Jika dilihat dari hasil submission terbuka. Fenomena yang disebut British Exit (Brexit) ini terjadi dikarenakan latar belakang yang dimiliki oleh negara Inggris dengan kebijakan Uni Eropa yang terlihat bersimpangan dan tidak satu frekuensi. Faktor-faktor penyebabnya diawali dengan masalah kedaulatan dan kestabilan negara yang harus mereka korbankan untuk meluruskan dan mengselaraskan dengan kebijakan Uni Eropa. (Kurnia, 2017) pemilihan Inggris yang berlangsung pada akhir Juni lalu cukup mengejutkan dunia internasional dan terkhusus bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Hasil choice dari seluruh all out pemilih yang ada di Inggris menunjukan 51,9% memilih untuk keluar dan 48,1% memilih untuk tetap berada di Uni Eropa. Ketika melihat kembali pada masa lampau ketika Inggris bergabung Uni Eropa pada tahun 1973 berangkat dengan tujuan meningkatkan perekonomian negaranya. Pasca perang dunia ke dua, negara-negara di kawasan Eropa khususnya Inggris mengalami krisis atau bisa dikatakan Eurozone yang berdampak buruk bagi negara Kawasan Uni Eropa. Integrasi Eropa menjadi jawaban dan kebutuhkan untuk membantu pertumbuhan kembali negara-negara yang mengalami kerugian pasca perang dunia kedua. (BBC News Indonesia, 2016)

Terdapat dua pendekatan dalam memahami pembentukan opini publik Euroscepticism di Britania Raya yang dikemukakan oleh Geoffrey dan Sarah

Butt, yaitu model yang digerakkan (*Driven Model*) dan digerakkan oleh pemilih (*The Citizen Driven model*). Model yang digerakan menyatakan bahwasanya Ketika opini pemilih maupun pendukung belum terbentuk atau berbeda dari pihak oposisi yakni Supportive of Brexit, maka opini masyarakat di Britania Raya mengenai Uni Eropa cenderung dipengaruhi oleh sikap Euroscepticism tersebut. Oleh, sebab itu para pendukung *"Stay"* for Brexit harus bergerak mendekat pada posisi pemerintah terhadap isu-isu Uni Eropa. Langkah tersebut akan berdampak jelas terhadap tingkat korelasi dianatara nilai inti politik, dukukung pemerintah *favorable to UE,* sikap terhadap Integrasi Uni eropa. (Acta Politica, 2007)

Kemudian, pendekatan ke-2 yakni digerakan oleh pemilih (*the citizen Driven model)* menjelaskan bahwa masalah integrasi Uni eropa mempengaruhi pilihan masyarakat dalam mendukung Brexit. Bukan sebaliknya, Asumsi dari model ini adalah sikap pendukung terhadap Uni eropa diformulasikan secara bebas maupun tidak bebas, maka sikap pendukung dari model ini berasal dari arahan suatu aktor Euroscepticismmaupun para aktor yang hostile to Eropa. (Acta Politica, 2007)

Pada akkhirnya Rakyat Inggris telah menentukan nasib terbaiknya melalui pemilihan yang akan menentukan masa depan negaranya, tetap bergabung atau keluar dari Integrasi Uni Eropa, Kamis, 23 Juni 2016. Dengan persentase kemenangan 52% dari Choice pemilih 71,8%, atau kurang lebih dari 30 juta orang yang memberikan suara. (Ridwan, 2016) Pada 24 Mei 2019 PM Theresa May mengundurkan diri sebagai pemimpin partai konservatif sekaligus perdana Menteri inggris, dan diganti oleh Boris Johnson mantan wali kota London setelah unggul melawan Jeremy Chase pada pemilu 2019. (Cnn Indonesia, 2019) Pada pukul 23.00. 31, Desember 2020, Britain Exit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa, resmi terjadi. Mengakhiri keanggotaan yang berusia 47 tahun. Momen bersejarah itu disambut sukacita dan tangis di seluruh negeri Britania Raya, menyelesaikan perdebatan bertahun-tahun tentang menadji sebuah keharusan yang harus dilaksanakan oleh mereka untuk mandiri di dunia. Inggris quip menjadi negara pertama yang meninggalkan Uni Eropa, organisasi yang didirikan untuk menyatukan Benua Biru sejak Perang Dunia II. (CNN, 2020)

Tetapi, penarikan diri Britania Raya dari Uni Eropa ternyata hanya diikuti oleh daerah Wales dan britain. Tidak dengan negara 2 daerah tergabung dalam kesatuan Britania Raya, yaitu negara Skotlandia dan Irlandia Utara. Bahkan skotlandia memilih untuk menarik dirinya dari negara kesatuan Inggris Raya jikalau Inggris Raya tidak memutskan untuk memerdekakan skotlandia menjadi sebuah negara. faktanya adalah mayoritas suara di Inggris (Britain) mendukung kampanye besar-besaran untuk meninggalkan rekan di 28 negaranya. Sedangkan

2 daerah lainya yakni Skotlandia dan Irlandia Utara memilih untuk remain di dalam keanggotan Integrasi Uni Eropa. Menteri pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon menegaskan, "Skotlandia akan siap menjadi yang pertama keluar pintu Britania Raya jika tetangga Inggris memilih tidak berada di dalam Uni Eropa". Beliau mengatakan lebih dari 60% masyarakat Skotlandia atau bisa disebut "Irish" yang memilih untuk remain atau menetap tinggal dalam bagian Integrasi Uni Eropa,(Tribunews.com, 2016) yang merupakan 48 persen dari pemilih di Inggris secara keseluruhan. Ini mencerminkan masyarakat Skotlandia mempunyai keyakinan yang sangat positif bahwa anggota Uni Eropa memberikan pengaruh yang moderat/seimbang secara logis pada kehidupan politik di Inggris Raya. (Tribunews.com, 2016)

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada tahapan secara terstruktur dimulai dari stregi kampanye serta gaktor-faktor yang mempengaruhi nya. Jadi dalam penilitan penulis berfokus pada pengaruh terbentuknya opini publik Euroascepticism ini di wilayah Britania Raya nya yang menyebabkan terpecah- nya masyarakat Briton menjadi 2 golongan yaitu, yang mendukung Uni Eropa dan Hostile to Uni Eropa.(Trader, 2016) Sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan choice Brexit yang telah dilaksanakan di London. euroscepticisme, yang juga disebut sebagai ekonomi Proteksionisme ini, menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi politisi, analis dan masyarakat biasa. Apabila dikaitkan dengan ketidaksepakatan terhadap proyek Uni Eropa, terdapat fenomena eurosceptic radikal yang merasa terancam pada bidang ekonomi mereka terhadap kebijakan pembentukan Uni Eropa menjadi lebih besar.

# Identifikasi masalah

* + 1. Bagaimanakah Sejarah dan perkembangan terbentuknya negara-negara di Britania Raya?
		2. Bagaimanakah kemunculan Euroscepticism serta faktor-faktor terbentuknya referendum Britain Exit?
		3. Mengapa masyarakat Britania Raya menginginkan untuk keluar dari Integrasi Uni Eropa melalui referendum Britain Exit?

# Pembatasan Masalah

Berdasarkan Sebagai usaha untuk membatasi diri dari penulisan ilmiah yang terlampau luas, Topik yang berusaha diangkat dalam penulisan ini adalah strategi kampanye Euraocepticism mengenai isu Britain Exit (Brexit). Karena sudah dapat dipastikan fenomena Brexit ini akan membawa perubahan yang sangat signifikan bagi masa depan Inggris Raya sendiri maupun negara-negara anggota Uni Eropa. maka dari itu penulis menerapkan pembatasan masalah yang berfokus kepada “bagaimana pengaruh Euroscepticism terhadap opini publik masyarakat Britania Raya sehingga terbentuknya opini publik menanggapi isu Britain Exit”.

Penelitian ini menggunkan teori konstruktivsisme, sebab pembahasan yang akan penulis titik-beratkan adalah sudut pandang publik serta sosial sebagai aktor internasional, dalam hal ini publik di wilayah Britania Raya. Secara teoritik dan konseptual, akan berfokus pada perilaku aktor yaitu negara.

# Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini penulis mengangkat Rumusan Masalah sebagai acuan penelitian dengan rumusan masalah yaitu :

# “Bagaimanakah strategi Britania Raya serta faktor-faktor yang mempengaruhi opini Euroscepticism terhadap publik di wilayah iBritania Raya Raya ??”

# Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# 1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh terbentuknya opini publik di Britania Raya tentang Britain Exit (Brexit), sebagai sebuah pilihan yang telah diputuskan yang mempunyai pengaruh besar terhadap keadaan politik

dan pertumbuhan ekonomi bagi Inggris sendiri maupun negara-negara yang terhimpun dalam Uni Eropa.

# 1.3.1 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan kontribusi secara praktis maupun teoritis dalam perkembangan yang dinamis dari hubungan internasional khususnya yang berkaitan langsung dengan judul yaitu “(Euroscepiticism dan Brexit : terbentuknya opini publik Euroscepticism di Britania Raya terhadap Britain Exit)” hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Untuk memperoleh ilmu dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan secara teoritis maupun secara praktis bagi setiap penulis, khususnya bagi yang berkaitan dengan ilmu di bidang ilmu hubungan internasional.
2. Untuk memberikan penjelasan pada pihak yang tertarik dan yang berminat untuk meneliti masalah tersebut sebagaimana untuk dijadikan tulisan yang komperatif bagi tulisan yang serupa serta menajdi bahan sebuah referensi tambahan yang berminat untuk dipelajari, mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai “(Euroscepiticism dan Brexit : Pengaruh terbentuknya Euroscepticism di Britania Raya Tentang Britain Exit (BREXIT) ”
3. Sebagai salah satu syarat menempuh ujian sarjana S1 Strata Satu di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung.